



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 dan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH


BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
BUPATI BANTUL, 



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA**
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

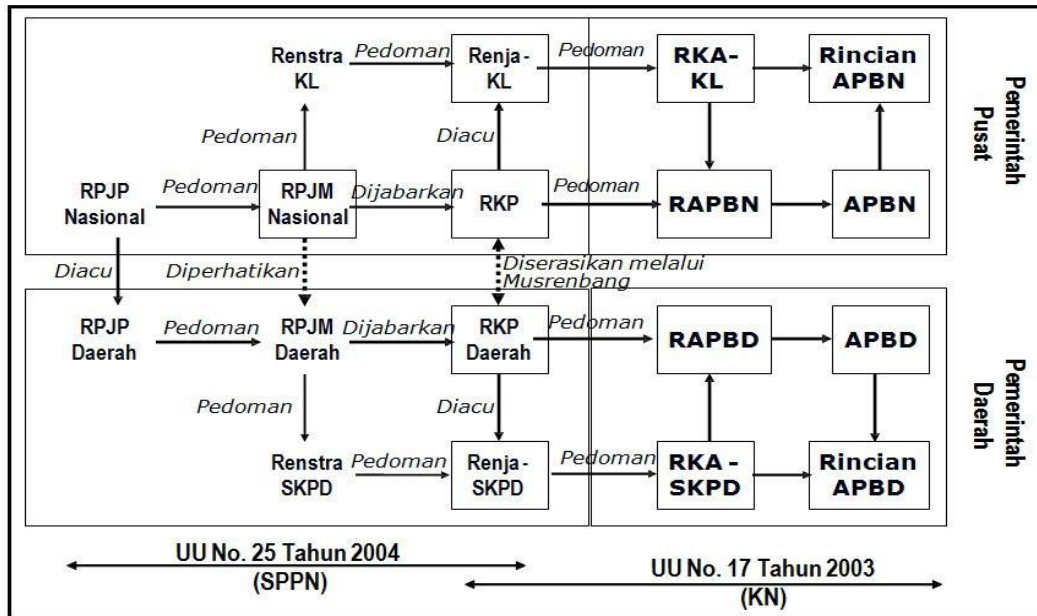
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Renja BKPSDM Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja BKPSDM Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2025 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja BKPSDM Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja BKPSDM Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja

Perangkat Daerah Tahun dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
 - m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
 - n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
 - o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

2. Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BKPSDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023.
2. Evaluasi Tahun 2023 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dan perkiraan realisasi Tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2023. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja BKPSDM Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9) atau 10 = 9*)	11 = (10/4)
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimeaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	90 Persen	12	40	24,53	61,33	60,00	96,69	24,17
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	100 Persen	100	100	100	100,00	100,00	300,00	75,00
4.01.04.5.02.03	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	4 Laporan	n/a	1	1	100,00	1,00	2,00	0,50
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	82,65 Angka	82,64	82,50	82,72	100,27	82,55	247,91	61,98
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	95,8 Persen	85	95,20	95,20	100,00	95,40	275,60	68,90
5.03.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	9	10	10	100,00	10,00	20,00	5,00
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34 Laporan	11	7	7	100,00	7,00	14,00	3,50
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95,8 Persen	95	95,20	95,20	100,00	95,40	285,60	71,40
5.03.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5512 Orang/Bulan	n/a	1.398	1.398	100,00	49,00	1.447,00	361,75
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	n/a	12	12	100,00	12,00	24,00	6,00
5.03.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	100 Laporan	21	26	26	100,00	26,00	52,00	13,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9) atau 10 = 9*	11 = (10/4)
		Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD								
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	97,4 Persen	97	97,10	97,10	100,00	97,20	291,30	72,83
5.03.01.2.06.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	76 Paket	n/a	12	12	100,00	12,00	24,00	6,00
5.03.01.2.06.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	48 Paket	n/a	12	12	100,00	12,00	24,00	6,00
5.03.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket	n/a	12	12	100,00	12,00	24,00	6,00
5.03.01.2.06.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	120 Dokumen	n/a	24	24	100,00	24,00	48,00	12,00
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80 Laporan	n/a	25	26	104,00	20,00	46,00	11,50
5.03.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440 Laporan	n/a	110	115	104,55	110,00	225,00	56,25
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	n/a	2	2	100,00	2,00	4,00	1,00
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	n/a	1	1	100,00	4,00	5,00	1,25
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100	100	100	100,00	100,00	300,00	75,00
5.03.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	n/a	12	12	100,00	12,00	24,00	6,00
5.03.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	n/a	12	12	100,00	12,00	24,00	6,00
5.03.01.2.08.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Laporan	n/a	12	12	100,00	12,00	24,00	6,00
5.03.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan	n/a	24	24	100,00	24,00	48,00	12,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9) atau 10 = 9*	11 = (10/4)
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 Persen	100	98	98	100,00	98,00	296,00	74,00
5.03.01.2.09.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	n/a	17	17	100,00	17,00	34,00	8,50
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	83 Persen	98	80	70	87,50	81,00	248,82	62,21
		Peta Kompetensi ASN	18 Persen	17,36	17	44,89	264,06	17,00	79,25	19,81
		Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	100 Persen	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keakuratan Data ASN	95 Persen	98	95	98,93	104,14	95,00	291,93	72,98
5.03.02.2.01.02	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	6 Dokumen	n/a	1	1	100,00	1,00	2,00	0,50
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	8 Dokumen	n/a	1	1	100,00	2,00	3,00	0,75
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2254 Dokumen	n/a	12	12	100,00	383,00	395,00	98,75
5.03.02.2.01.11	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	120 Dokumen	n/a	25	25	100,00	25,00	50,00	12,50
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional	80 Persen	98	79	84,70	107,22	80,00	262,30	65,58
5.03.02.2.02.01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	6200 Dokumen	n/a	1.350	1.418	105,04	2.500,00	3.918,00	979,50
5.03.02.2.02.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4000 Dokumen		945	978	103,49	800,00	1.778,00	444,50

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9) atau 10 = 9*	11 = (10/4)
5.03.02.2.02.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	18 Persen	20,45	20	31,43	157,15	20,00	71,88	17,97
5.03.02.2.03.01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	258 Orang	n/a	65	67	103,08	20,00	87,00	21,75
5.03.02.2.03.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	2250 Dokumen	n/a	2.115	2.449	115,79	2.556,00	5.005,00	1.251,25
5.03.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	390 Orang	n/a	16	17	106,25	170,00	187,00	46,75
5.03.02.2.03.05	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	40 Dokumen	n/a	14	14	100,00	10,00	24,00	6,00
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	24550 Orang	n/a	5.000	6.520	130,40	50,00	6.570,00	1.642,50
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	100 Persen	98	95	100,70	106,00	95,00	293,70	73,43
5.03.02.2.04.02	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	36596 Dokumen	n/a	7.956	7.956	100,00	7.908,00	15.864,00	3.966,00
5.03.02.2.04.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3584 Orang	n/a	222	222	100,00	231,00	453,00	113,25
5.03.02.2.04.07	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	560 Orang	n/a	30	31	103,33	30,00	61,00	15,25

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perubahan target dari Paniradya DIY
2.	Program Kepegawaian Daerah	Jumlah seluruh ASN belum memenuhi kebutuhan formasi ASN di Pemkab Bantul

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kerjasama yang baik dengan pihak terkait (Paniradya Kaistimewan DIY,dll)
2	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Keistimewaan Diklat	- Kerjasama yang baik dengan pihak terkait (Paniradya Kaistimewan DIY,dll) - Partisipasi aktif dari peserta diklat
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kesesuaian dokumen dalam komponen penilaian saki

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Komitmen dan Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait (Bappeda, BPKPAD, Inspektorat)
5.	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan pihak terkait (Bappeda, BPKPAD, Inspektorat) - ketersediaan data perencanaan; - Kepatuhan terhadap jadwal.
6.	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan aplikasi SIPD, Sakip, dll; - Kerjasama yang baik dengan tim kerja
7.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait
8.	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketepatan perencanaan penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan Kinerja
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan aplikasi; - Kerjasama yang baik dengan tim kerja.
10.	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan aplikasi; - Kerjasama yang baik dengan tim kerja
11.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait
12.	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan; - Adanya dukungan data; - Tersedianya pilihan penyedia jasa.
13.	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersusunnya rencana kebutuhan kegiatan
14.	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya rencana kebutuhan kegiatan; - Tersedianya pilihan penyedia jasa.
15.	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kemudahan dan tersedianya bahan bacaan;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		- Tersedianya pilihan penyedia jasa.
16.	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan (Perangkat Daerah, Instansi Pusat dll)
17.	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kerjasama yang baik dengan tim kerja pengelolaan arsip dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kerjasama yang baik dengan tim kerja SPBE dan Penyedia jasa
19.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kerjasama yang baik dengan internal BKPSDM
20.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kemudahan dan ketersediaan penyedia jasa telekomunikasi
21.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Adanya data rencana kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor; - Kemudahan dan ketersediaan penyedia
22.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kemudahan dan ketersediaan penyedia jasa
23.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kerjasama yang baik diinternal BKPSDM
24.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Adanya data rencana kebutuhan pemeliharaan kendaraan; - Kemudahan dan ketersediaan penyedia.
25.	Program Kepegawaian Daerah	Kerjasama yang baik dengan tim kerja
26.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kerjasama yang baik dengan tim kerja dan Instansi Pusat
27.	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis	- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan Instansi Pusat.
28.	Sub. Kegiatan Evaluasi Pemberhentian ASN	- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan instansi pembina. - Dukungan pengelola kepegawaian perangkat daerah
29.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	- Koordinasi yang baik antar bidang dalam proses updating data kepegawaian; - Ketersediaan sumber daya yang memadai.
30.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Kerjasama yang baik dengan tim kerja
31.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan semua pihak.
32.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan instansi pembina.
33.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan semua pihak.
34.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Kerjasama yang baik dengan tim kerja
35.	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	- Kerjasama yang baik dengan pihak penyelenggara; - Ketersediaan data.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
36.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama yang baik dengan pihak terkait; - Ketersediaan SDM assessor; - Ketersediaan sarana penunjang.
37.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan/peraturan; - Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan.
38.	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan/peraturan; - Kerjasama yang baik dengan penyelenggara diklat; - Kesadaran ASN dalam pengembangan kompetensi.
39.	Sub. Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan aplikasi; - Kerjasama yang baik dengan perangkat daerah dalam proses penyusunan dan verifikasi angka kredit PNS jabatan fungsional.
40.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kerjasama yang baik dengan tim kerja
41.	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan/peraturan; - Ketersediaan aplikasi; - Kesadaran ASN untuk Menyusun dokumen penilaian kinerja; - Kerjasama yang baik dengan semua pihak.
42.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan aplikasi; - Komitmen dan Kerjasama yang baik oleh pelaksana kegiatan.
43.	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan/peraturan; - Kesadaran ASN terkait kedisiplinan dan kode etik pegawai.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan Instansi Pusat terkait dengan kebijakan pada bidang kepegawaian;
2. Peningkatan koordinasi dengan Paniradya DIY dan Bandiklat DIY terkait target dan pelaksanaan kegiatan internalisasi keistimewaan agar berjalan optimal;
3. Intensifikasi kolaborasi dengan pihak/stakeholder terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan;
4. Kesenambungan pengembangan kompetensi ASN.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKPSDM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Target			Catatan Analisis
			Target	Realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	57,44 Nilai	70 Nilai	72,68 Nilai	71 Nilai	72 Nilai	73 Nilai	Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Target			Catatan Analisis
			Target	Realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
								Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat bagi Pegawai ASN, bagi Instansi Pemerintah, bagi Masyarakat.

Sesuai pencapaian IKU BKPSDM Tahun 2023 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU BKPSDM Capaian Indeks Profesionalitas ASN telah memenuhi target.

IKU tersebut memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesadaran ASN untuk meningkatkan kompetensi;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kompetensi dan penilaian kompetensi serta tersedianya aplikasi kepegawaian (SAPA ASN) yang sudah tersinkronisasi dengan aplikasi kepegawaian nasional SI-ASN;
- c. Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan Badan Kepegawaian Negara selaku instansi Pembina Kepegawaian;
- d. Dukungan Tim kerja pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU BKPSDM Tahun 2023 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2025 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Fokus peningkatan Indeks Profesionalitas ASN melalui peningkatan kompetensi, pengelolaan kinerja dan sistem merit;
2. Intensifikasi monitoring dan evaluasi kegiatan (dilaksanakan setiap bulan);
3. Peningkatan konsolidasi antar bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BKPSDM merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Kekuatan	Kelemahan
Ketersediaan sumber daya manusia	Kompetensi sumber daya manusia di BKPSDM Kab. Bantul yang belum merata
Tersedianya teknologi informasi	Sistem informasi kepegawaian belum terintegrasi
Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas sumber data kepegawaian	Belum memiliki data kepegawaian secara lengkap

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang	Tantangan
Kebijakan Manajemen Kepegawaian	Pelaksanaan sistem merit yang belum optimal
Reformasi birokrasi di bidang sumber daya aparatur	Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur
Tawaran pengembangan kompetensi bagi ASN	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2025 yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam integrasi, pembaharuan dan pengembangan Aplikasi SAPA ASN;
2. Penilaian Kompetensi melalui metode *Assessment Center* untuk mendapatkan informasi profil potensi dan kompetensi ASN serta sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan karir ASN

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas data dengan melakukan optimalisasi sumber daya aparatur dan pembaharuan secara berkala;
4. Mengoptimalkan penerapan Sistem Merit.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan BKPSDM Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.04.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan****)	Kab. Bantul	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	40 Persen	741.084.500	4.01.04. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan	Kab. Bantul	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	25 Persen	652.500.000	
	4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan****)	Kab. Bantul	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	100 Persen	741.084.500	4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kab. Bantul	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	100 Persen	652.500.000	
	4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota****)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	1 Laporan	741.084.500	4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	1 Laporan	652.500.000	
	5.03. 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.55 Angka	8.751.641.490	5.03. 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.55 Angka		
	5.03. 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi	95.4 Persen	13.415.875	5.03. 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	10.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	5.03. 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.249.650	5.03. 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.000.000	
	5.03. 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7.166.225	5.03. 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	5.500.000	
	5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95.4 Persen	6.889.798.025	5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95.4 Persen	8.474.161.383	
	5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1378 Orang/Bulan	6.741.903.900	5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1378 Orang/Bulan	8.326.001.838	
	5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	143.160.000	5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	143.160.000	
	5.03. 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	22 Laporan	4.734.125	5.03. 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	22 Laporan	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					n/Semesteran SKPD			
	5.03. 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	97.2 Persen	1.254.749.000	5.03. 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	97.1 Persen	1.316.669.485	
	5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	193.526.380	5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	431.669.485	
	5.03. 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	26.591.400	5.03. 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	
	5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	51.907.212	5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	
	5.03. 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.904.000	5.03. 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.000.000	
	5.03. 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	7.500.000	5.03. 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	10.000.000	
	5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	110 Laporan	920.572.180	5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	110 Laporan	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		dan Konsultasi SKPD			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		dan Konsultasi SKPD			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	21.747.828	5.03. 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	27.000.000	
	5.03. 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	30.000.000	5.03. 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	300.000.000	
	5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	237.784.590	5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	137.047.680	
	5.03. 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.100.000	5.03. 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	
	5.03. 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.314.000	5.03. 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.200.000	
	5.03. 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Laporan	127.776.000	5.03. 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Laporan	70.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
	5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	69.594.590	5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	51.847.680	
	5.03. 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	98 Persen	355.894.000	5.03. 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	98 Persen	300.000.000	
	5.03. 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	355.894.000	5.03. 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	300.000.000	
	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Kab. Bantul	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	81 persen	1.979.972.500	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Kab. Bantul	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	98 persen	7.470.760.640	
			Peta Kompetensi ASN	12 persen	3.944.595.000			Peta Kompetensi ASN	40 persen		
			Persentase Penanganan	100 persen	453.429.000			Persentase Penanganan	100 persen		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Terhadap Pelanggaran Disiplin					Terhadap Pelanggaran Disiplin			
	5.03.02.2.01 Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Bantul	Persentase Keakuratan Data ASN	95 Persen	1.335.135.500	5.03.02.2.01 Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Bantul	Persentase Keakuratan Data ASN	98 persen	1.326.072.640	
	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	14.000.000	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	25.400.000	
	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	1.186.000.000	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	1.124.599.680	
	5.03.02.2.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	504 Dokumen	76.015.000	5.03.02.2.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	530 Dokumen	95.000.000	
	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bantul	Laporan updating data kepegawaian	24 Dokumen	65.120.500	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	25 Dokumen	81.072.960	
	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Bantul	Persentase pengisian JPT. Administrator .	80 Persen	638.837.000	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Bantul	Persentase pengisian JPT. Administrator .	98 Persen	875.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pengawas dan Jabatan Fungsional					Pengawas dan Jabatan Fungsional			
	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	800 Dokumen	481.574.000	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	800 Dokumen	745.000.000	
	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	157.263.000	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	925 Dokumen	130.000.000	
	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Bantul	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Persen	3.944.595.000	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Bantul	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20,5 Persen	4.484.688.000	
	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	14.250.000	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	35.000.000	
	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	500 Dokumen	68.500.000	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	3000 Dokumen	150.000.000	
	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	136.250.000	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	85 Orang	376.880.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	10 Dokumen	3.626.408.000	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	10 Dokumen	3.882.808.000	
	5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	4950 Orang	99.187.000	5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Bantul	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	4950 Orang	40.000.000	
	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	90 Persen	453.429.000	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	98 Persen	800.000.000	
	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8671 Dokumen	33.550.000	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7884 Dokumen	355.000.000	
	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	896 Orang	345.334.000	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	230 Orang	350.000.000	
	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	110 Orang	74.545.000	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	35 Orang	95.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2025 serta tugas dan fungsi BKPSDM.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2025 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
- PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
- PN 5: Melanjtkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
- PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
- PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan prioritas nasional tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh BKPSDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN guna pembangunan manajemen talenta untuk pelaksanaan sistem merit;
2. Layanan Data ASN Terintegrasi yang bertujuan untuk menghasilkan data ASN yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah;
3. Terwujudnya perencanaan dan pengadaan sumber daya aparatur yang efektif dan efisien serta pengelolaan tata laksana kepegawaian yang berbasis teknologi informasi dengan arah kebijakan perencanaan dan rekrutmen ASN secara terbuka dan independen, serta pengelolaan data dan dokumen kepegawaian yang akurat untuk peningkatan layanan kepegawaian;
4. Meningkatkan kompetensi aparatur dan mewujudkan ASN yang berkarakter dengan arah kebijakan penempatan dan promosi secara kompetitif dan terbuka, serta Pelaksanaan dan pengiriman pendidikan dan pelatihan aparatur;
5. Meningkatkan disiplin aparatur dengan arah kebijakan mewujudkan aparatur yang berintegritas dan disiplin serta pemberian tambahan penghasilan berbasis pada jabatan dan kinerja;
6. Menyelenggarakan urusan keistimewaan Yogyakarta pada urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2025 dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah" dengan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
2. Pemerataan kualitas infrastruktur.
3. Peningkatan SDM berdaya saing.
4. Pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
5. Pemantapan layanan publik berbasis informasi teknologi.
6. Pengembangan kawasan pansela dan kawasan industri piyungan

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
				Tahun 2022	Tahun 2023		
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	2,92 Angka	3,1958 Angka	4.2315 Angka	4,2815 Angka
		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	59, 44 Nilai	72,68 Nilai	71 Nilai	72 Nilai

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul		7.562.077,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	6.600.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul		8.671.132,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-			95.6 Persen	17.682.265.790,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul	-	6.997.119.190,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1378 Orang/bulan	17.537.580.790,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul		6.848.230.899,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	142.560.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul		143.160.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul		3.513.840,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	11.225.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul		7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	422.430.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul		1.030.394.055,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	11.285.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul		47.614.872,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	167.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-			100 Persen	97.710.232,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul	-	310.755.274,00	
	5	03	01	2.08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul		14.641.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	6.600.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul		34.259.940,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	33.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul		147.581.280,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					24 Laporan	55.610.232,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul		114.273.054,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	5	03	01	2.	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	-			98 Persen	244.717.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul	-	430.631.740,00			
	5	03	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															02	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	244.717.400,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BKPSDM Kab. Bantul		430.631.740,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
3	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengisian Kebutuhan Formasi ASN	-			82 Persen	4.864.286.732,00						-	6.426.350.800,00			
	5	03	02	2.	01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keakuratan Data ASN	-			95 Persen	958.677.732,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul	-	1.346.135.800,00			
	5	03	02	2.	00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN															01	02
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	7.687.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul		16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.	00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK															01	03
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	758.480.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul		1.184.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.	00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi															01	06
						Pemberhentian																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				402 Dokumen	128.850.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul		76.015.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				25 Dokumen	63.660.232,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul		70.120.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional	-			84 Persen	551.972.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul	-	655.318.000,00	
	5	03	02	2.02	001	Pengelolaan Mutasi ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				800 Dokumen	468.875.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul		492.818.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				800 Dokumen	83.097.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul		162.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-			31 Persen	2.838.949.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul	-	3.936.408.000,00	
	5	03	02	2.03	00 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
						Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya					53 Orang	15.625.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul		20.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	00 02	Pengelolaan Assessment Center														
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center					500 Dokumen	142.800.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul		70.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	00 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					90 Orang	258.125.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul		145.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	00 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat					10 Dokumen	2.422.399.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul		3.700.408.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	-			100 Persen	514.687.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul	-	488.489.000,00			
	5	03	02	2.04	00 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					9149 Dokumen	184.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul		40.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.04	00 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan					896 Orang	296.487.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul		370.334.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.04	00 07	Pembinaan Disiplin ASN																
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan					139 Orang	34.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kab. Bantul		77.605.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
J U M L A H												24.164.669.434,00									16.343.225.912,00	

BAB V. PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Kepala,
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bantul

